

DAFTAR INFORMASI PUBLIK DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2024

INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN BERKALA								
NO	RINGKASAN ISI INFORMASI	UNIT KERJA YANG Menguasai	PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN / PENERBIT INFORMASI	WAKTU PEMBUATAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA			RETENSI ARSIP
					CETAK	REKAM	ONLINE	
1.	Profil							
1.1	<p>Kedudukan dan Alamat Lengkap</p> <p>Jl. Pulau Bangka Komplek Perkantoran Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Telp. (0717) 439279.</p> <p>Kedudukan Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020</p>	Kasub Bag Umum	Sekretaris Dinas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Pangkalpinang, 2020	Cetak			Sampai dengan ada perubahan
1.2	<p>Tugas Pokok dan Fungsi</p> <p>Tugas : Membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perhubungan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Provinsi.</p> <p>Fungsi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan yang menjadi kewenangan Provinsi; 2. Penyelenggaran kebijakan teknis di bidang perhubungan yang menjadi kewenangan Provinsi; 3. Penyelenggaan administrasi Dinas Perhubungan; penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas Perhubungan; dan penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya 	Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Pangkalpinang, 2020	Cetak		Online	Sampai dengan ada perubahan

1.3	Visi dan Misi Visi dan Misi tertuang dalam RPJMD Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022	Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Gubernur Kepulauan Bangka Belitung	Pangkalpinang, 2017	Cetak			5 Tahun
1.4	Maksud dan Tujuan tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022	Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Pangkalpinang, 2017	Cetak			5 Tahun
1.5	Struktur Organisasi dari Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tertuang dalam Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung No. 29 Tahun 2020	Kasub Bagian Umum	Sekretaris Dinas	Pangkalpinang, 2023	Cetak			Sampai dengan ada perubahan
1.6	Profil Singkat Pejabat Struktural meliputi nama, pendidikan	Kasub Bagian Umum	Sekretaris Dinas	Pangkalpinang, 2023	Cetak			1 Tahun
1.7	Jumlah pegawai yang bekerja di Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Kasub Bagian Umum	Sekretaris Dinas	Pangkalpinang, 2023	Cetak			1 Tahun
2	Nama Program dan Kegiatan Program dan Kegiatan yang dilaksanakan Dinas Perhubungan Babel pada Tahun Anggaran 2023	Kasub Bagian Perencanaan	Kepala Dinas	Pangkalpinang, 2023	Cetak			1 Tahun
3	Ringkasan Laporan Keuangan Informasi tentang Ringkasan Laporan Keuangan Tahun 2023	Kasub Bagian Keuangan	Kepala Dinas	Pangkalpinang, 2023	Cetak			1 Tahun
3.1	Rencana dan Laporan Realisasi Anggaran Informasi tentang Rencana dan Laporan Realisasi Anggaran 2023	Kasub Bagian Keuangan	Kepala Dinas	Pangkalpinang, 2023	Cetak			1 Tahun
3.2	Neraca Informasi tentang Neraca Keuangan Tahun 2023	Kasub Bagian Keuangan	Kepala Dinas	Pangkalpinang, 2023	Cetak			1 Tahun
3.3	Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan yang disusun sesuai standar akuntansi yang berlaku. Informasi tentang Laporan Arus Kas dan Catatan Atas laporan Keuangan yang disusun sesuai standar akuntansi yang berlaku Tahun 2023	Kasub Bagian Keuangan	Kepala Dinas	Pangkalpinang, 2023	Cetak			1 Tahun
3.4	Daftar Aset yang dikuasai Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Sekretariat	Kepala Dinas	Pangkalpinang, 2023	Cetak			1 Tahun
4.	Pengadaan barang dan jasa merupakan informasi pengadaan barang dan jasa yang tersedia pada Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)	Biro Pengadaan Barang/Jasa	Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa	Pangkalpinang, 2023	Cetak			Sampai dengan ada perubahan

INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN SETIAP SAAT

NO	RINGKASAN ISI INFORMASI	UNIT KERJA YANG MENGUASAI	PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN / PENERBIT INFORMASI	WAKTU PEMBUATAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA			RETENSI ARSIP
					CETAK	REKAM	ONLINE	
1.	Daftar Surat Keputusan Kepala Dinas. Informasi tentang peraturan, keputusan dan/atau kebijakan badan publik.	Sekretariat	Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Pangkalpinang	Cetak			Sampai dengan ada perubahan
2.	Informasi tentang kepegawaian, pejabat dan staf di Lingkungan Dinas Perhubungan Babel meliputi nama, NIP, jabatan dan kepangkatan.	Kasub Bag Umum	Sekretaris Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Pangkalpinang	Cetak			Sampai dengan ada perubahan
3	Informasi mengenai kegiatan pelayanan informasi publik yang dilaksanakan, sarana dan prasarana layanan informasi publik yang dimiliki beserta kondisinya, sumber daya manusia yang menangani layanan informasi publik beserta laporan penggunaannya. Laporan Tahunan PPID Pelaksana di lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Sekretariat dan Bidang	Sekretaris dan Bidang Dinas Perhubungan Babel	Pangkalpinang	Cetak			Sampai dengan ada perubahan
4	Informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat publik dalam pertemuan uang terbuka untuk umum. Informasi ini tertuang dalam kolom berita pada website, dan media sosial	Sekretariat	Sekretaris	Pangkalpinang 2023			online	Sampai dengan ada perubahan
5	Agenda kerja pimpinan satuan kerja terkait dengan rencana kegiatan pimpinan	Sekretariat	Sekretaris	Pangkalpinang	Cetak			Sampai dengan ada perubahan
6	Informasi tentang rencana gangguan terhadap utilitas publik	Masing-masing OPD	Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Pangkalpinang			online	Sampai dengan ada perubahan

INFORMASI YANG DIKECUALIKAN					
NO	RINGKASAN ISI INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI		BATAS WAKTU PENGECEUALIAN
			AKIBAT INFO DIBUKA	AKIBAT INFO DITUTUP	
1.	Dokumen pengadaan barang /jasa dari penyedia barang/jasa	Undang Undang KIP Pasal 17	Informasi yang tidak boleh diungkapkan karena akan mengganggu jalannya proses pengadaan barang dan jasa yang akan dilakuka.	Menjaga agar proses pengadaan barang dan jasa dari penyelia dapat berjalan dengan baik	1 Tahun
2.	Dokumen hasil atau proses penjatuhan hukuman disiplin /pelanggaran etika pegawai	Undang Undang KIP Pasal 17	Informasi yang tidak boleh diungkapkan karena akan membuka rahasia pribadi pegawai	Menjaga rahasia pribadi pegawai.	Sampai dengan ada perubahan
3.	Dokumen perjanjian kerjasama	Undang Undang KIP Pasal 17	Informasi yang tidak boleh diungkapkan karena akan mengganggu proses perjanjian yang dilakukan.	Menjaga rahasia pribadi yang terdapat dalam perjanjian kerjasama	Sampai dengan ada perubahan
4.	Biodata PNS, pegawai honorer	Undang Undang KIP Pasal 17	Dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi seperti: riwayat dan kondisi anggota keluarga; rekening bank; hasil evaluasi yang berhubungan dengan kapabilitas, intelektualitas dan rekomendasi kemampuan pegawai; kegiatan satuan Pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal	Menjaga agar data informasi pegawai tidak sembarangan disebar dan akan berdampak kepada pelanyahgunaan kepentingan	Selama berlaku
5.	Dokumen notulen rapat berdasarkan sifat rapat	Undang Undang KIP Pasal 17	Data dinas akan disalahgunakan	Menjaga agar informasi yang ada dalam notulen rapat tidak disebarakan sembarangan yang mana berdampak pada penyalahgunaan informasi.	Sampai dengan ada perubahan
6.	Dokumen usulan promosi, mutasi dan rotasi pegawai	Undang Undang KIP Pasal 17	Informasi yang tidak boleh diungkapkan karena akan membuka rahasia pribadi pegawai yang akan di promosi, mutasi dan rotasi	Menjaga agar proses promosi, mutasi dan rotasi dapat berjalan sesuai dengan harapan pimpinan.	1 Tahun
7.	Dokumen dan berita acara pembinaan aparatur	Undang Undang KIP Pasal 17	Informasi yang tidak boleh diungkapkan karena akan membuka rahasia pribadi pegawai.	Menjaga agar proses pembinaan pegawai dapat berjalan dengan lancar.	1 Tahun
8.	Laporan keuangan sebelum di audit (unaudited)	Undang Undang KIP Pasal 17	Mencegah, melindungi kesimpangsiuran informasi	Menjaga agar informasi yang belum	1 Tahun

				dilakukan audit oleh yang berwenang (BPK) tidak beredar umum dan dapat berdampak atau disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.	
9.	Konfigurasi database dan aplikasi serta username dan password yang digunakan dinas	Undang Undang KIP Pasal 17	Informasi yang tidak boleh diungkapkan karena akan membuka rahasia database dan username serta password pegawai yang merupakan tugas kedinasan	Menjaga rahasia konfigurasi database dan aplikasi serta username dan password yang digukan terjaga dari orang yang tidak bertanggungjawab	Selama berlaku
10.	Data piutang, gaji dan tunjangan pegawai	Undang Undang KIP Pasal 17	Informasi yang tidak boleh diungkapkan karena akan membuka rahasia pribadi pegawai.	Menjaga rahasia pribadi pegawai	Selama berlaku
11.	Rincian harga perkiraan sendiri pada proses pengadaan barang/jasa	Undang Undang KIP Pasal 17	Informasi yang tidak boleh diungkapkan karena akan menghambat proses pengadaan dan pelaksanaan kegiatan	Menjaga pelaksanaan proses pengadaan berjalan dengan baik dan tepat sesuai dengan anggaran yang sudah ditentukan	Selama berlaku
12.	Dokumen penawaran pada proses kontrak pengadaan barang/jasa	Undang Undang KIP Pasal 17	Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang sesuai Pasal 17 UU KIP karena akan membuka rahasia pribadi pegawai dan mitra	Menjaga rahasia pribadi pegawai	Selama berlaku
13.	Dokumen Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), daftar penilaian kinerja dan kompetensi, evaluasi organisasi dan tata kerja	Undang Undang KIP Pasal 17	Informasi yang tidak boleh diungkapkan karena akan membuka rahasia pribadi pegawai	Menjaga rahasia pribadi pegawai	Selama berlaku
14.	Laporan keuangan tahun berjalan	Undang Undang KIP Pasal 17	Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang sesuai Pasal 17 UU KIP karena belum adanya pemeriksaan yang dilakukan oleh Lembaga yang berwenang (BPK)	Menjaga agar informasi yang belum dilakukan audit oleh yang berwenang (BPK) tidak beredar umum	Selama berlaku
15.	Laporan pelaksanaan anggaran tahun berjalan	Undang Undang KIP Pasal 17	Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang sesuai Pasal 17 UU KIP karena belum adanya pemeriksaan yang dilakukan oleh Lembaga yang berwenang (BPK)	Menjaga agar informasi yang belum dilakukan audit oleh yang berwenang (BPK) tidak beredar umum	Selama berlaku
16.	Dokumen penawaran pada proses kontrak pengadaan barang/jasa	Undang Undang KIP Pasal 17	Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang sesuai Pasal 17 UU KIP karena belum adanya pemeriksaan yang dilakukan oleh Lembaga yang berwenang (BPK)	Menjaga agar informasi yang belum dilakukan audit oleh yang berwenang (BPK) tidak beredar umum	1 Tahun

17.	Dokumen usulan peserta diklat struktural dan teknis	Undang Undang KIP Pasal 17	Mencegah pemanfaatan dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab	Hanya untuk diketahui oleh pejabat yang bersangkutan dan lembaga pelatihan	1 Tahun
-----	---	-------------------------------	--	--	---------

Ditetapkan di Pangkalpinang
Tanggal Juni 2024

Kepala Dinas Perhubungan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung


Drs. ASBAN ARIS, MH
Pembina Utama Madya/IV.d
NIP.19660224 199412 1 003